

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Terjadinya berbagai skandal akuntansi di beberapa negara yang melibatkan perusahaan-perusahaan publik besar dan kantor akuntan publik (KAP) besar pada tahun 1990-an, telah menyebabkan berkembangnya praktik *good corporate governance* di berbagai negara. Di Asia termasuk Indonesia, konsep *good corporate governance* ini mulai banyak diperbincangkan pada pertengahan tahun 1997, yaitu saat krisis ekonomi melanda kawasan ini. Dampak dari krisis tersebut menunjukkan banyak perusahaan yang tidak dapat bertahan, salah satu penyebabnya adalah karena pertumbuhan yang dicapai selama ini tidak dibangun di atas landasan yang kokoh sesuai prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat (Suprayitno dalam Supatmi, 2007).

Good corporate governance (GCG) merupakan suatu struktur yang diterapkan agar perusahaan dapat semakin berkembang dan terus meningkatkan kinerja dengan didasari oleh perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Sebagaimana dijelaskan oleh *Cadbury* bahwa definisi *good corporate governance* adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Berkaitan dengan nilai-nilai etika yang mendasari kegiatan bisnis sebagaimana disebutkan sebelumnya, terdapat lima prinsip *good corporate governance* menurut kementerian BUMN, yaitu *transparency* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility*

(pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian), dan *fairness* (kewajaran) (Asisiura, 2014).

Sebagaimana disampaikan oleh *International Finance Corporation* (IFC) *Corporate Governance Project* dalam acara Konferensi IFC dan Antara Media Training on Corporate Governance Reporting di Jakarta tahun 2013, pelaksanaan *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik oleh pelaku usaha dinilai memberikan keuntungan besar bagi kondisi perusahaan yang menerapkannya, maupun dampak secara global terhadap perekonomian nasional. Dengan penerapan *good corporate governance*, perusahaan mendapatkan beberapa keuntungan mulai dari memberikan nilai tambah bagi perusahaan, baik secara citra dan sisi keuangan yang akan tertata dengan lebih baik, sampai dengan mendapatkan kepercayaan dari investor baik lokal maupun luar negeri untuk menanamkan uangnya sehingga perusahaan akan dengan mudah mendapatkan akses modal. Selain itu, tidak hanya perusahaan yang meraih keuntungan, penerapan *good corporate governance* juga berdampak bagi perekonomian lebih umum dimana satu perusahaan berada, seperti negara (www.bisnis.liputan6.com).

Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa perilaku dan kinerja dunia usaha atau korporasi akan berdampak langsung bagi membaiknya fundamental dan kondisi makro perekonomian Indonesia. Kelemahan mendasar pada perekonomian di Indonesia terutama disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu: kinerja keuangan yang buruk, daya saing yang rendah, ketiadaan profesionalisme, tidak responsif terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis, pengelolaan ekonomi dan sektor usaha yang kurang efisien, serta sistem

perbankan yang rapuh (Studi Implementasi *Good Corporate Governance* di Sektor Swasta, BUMN, dan BUMD – Komisi Pemberantasan Korupsi, 2007).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* secara berkesinambungan sehingga berpotensi memicu terjadinya krisis keuangan. Diperlukan penerapan *good corporate governance* secara baik dan berkelanjutan pada perusahaan di Indonesia, pasalnya hal ini dapat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan, keseimbangan kerja, serta pemahaman menyeluruh dari manajemen perusahaan. Lebih dari itu, penerapannya dapat membuat perusahaan melakukan manajemennya secara handal, memitigasi risiko, menjaga standar kualitas produk, meningkatkan akses permodalan, dan membuat perusahaan lebih efisien. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih transparan sehingga memberikan kepercayaan diri bagi investor untuk bisa menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut (www.bisnis.liputan6.com).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pilar utama pelaksana perekonomian Indonesia seharusnya dapat dijadikan contoh praktik pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Namun nyatanya, masih ada saja aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh BUMN yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang malah menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan hasil penelaahan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester 1 tahun 2013, masih banyak terjadi

kasus penyimpangan keuangan negara di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikarenakan BUMN tersebut belum memiliki tata kelola atau *good corporate governance* yang baik sehingga menimbulkan potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan (www.ift.co.id).

Salah satu contoh tidak terlaksananya *good corporate governance* di BUMN khususnya prinsip *transparency* dan *responsibility* terlihat pada kasus PT Garam. PT Garam yang merupakan BUMN yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran garam melakukan pelanggaran dengan mengalihkan dana program PKBL dan membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai. Dana yang semula direncanakan untuk program penguatan petani garam yang dimaksudkan untuk membantu petani dengan memberikan bantuan kredit dengan bunga kecil tidak disalurkan dan ditarik kembali untuk dimasukkan ke rekening milik PT Garam. Setelah itu, manajemen membuat laporan pertanggungjawaban yang seolah-olah dana program PKBL tersebut telah disalurkan sebagaimana rencana yang telah dibuat (www.lensaindonesia.com).

Keberhasilan penerapan *good corporate governance* tidak bisa terlepas dari peran pengendalian intern yang baik dan mampu memenuhi kebutuhan *stakeholder* serta menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan internal kontrol dalam sebuah organisasi. Pengendalian intern mencakup lima kategori kebijakan dan prosedur yang dirancang dan digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan pengendalian dapat dipenuhi (Lestari, 2013).

Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) 2011:319.2 dalam Agoes, 2014 :100).

Penelitian yang lain mengatakan bahwa baik buruknya *good corporate governance* BUMN di Indonesia memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pengendalian intern khususnya dalam komponen lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari komponen pengendalian intern lainnya karena lingkungan pengendalian mencakup unsur nilai integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan pengawas, filosofi manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, serta kebijaksanaan dan praktik sumber daya manusia (Pratolo, 2007).

Selain memperhatikan pengendalian intern dalam upaya memaksimalkan penerapan *good corporate governance*, perusahaan juga perlu memperhatikan kualitas manajemennya. Dalam persaingan yang semakin tajam di mana perilaku pasar telah berubah dari *buyer-market* menjadi *seller-market*, perusahaan yang tidak dapat memenuhi tuntutan pasar atau konsumen akan tergeser. Untuk dapat menghadapi situasi seperti itu, perusahaan perlu melakukan segala upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan maupun mutu barang atau jasa yang dihasilkan (Rivai, 2014 : 305).

Lingkungan bisnis yang kompetitif mengharuskan organisasi untuk fokus ke dalam dimensi kinerja yang kompleks, yaitu kualitas dan inovasi. Ini dikarenakan ketidakpastian lingkungan dapat menjadi ancaman bagi program manajemen kualitas yang dijalankan pada organisasi tersebut, dan saat ini *total quality management* dianggap sebagai dasar untuk peningkatan produktivitas, profitabilitas, dan kepuasan pelanggan bagi organisasi (Yunoh dan Ali, 2015).

Total quality management merupakan alat pengendalian mutu yang berfokus pada pelanggan baik internal maupun eksternal, memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas, dan perbaikan proses secara berkesinambungan serta memiliki komitmen jangka panjang. *Total quality management* dapat dijadikan sebagai salah satu model yang diterapkan dalam menjalankan usaha untuk mewujudkan *good governance* melalui perbaikan terus menerus produk jasa, manusia, proses, dan lingkungannya (Sri Fadilah, 2011).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sri Fadilah (2011) yang berjudul Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern dan *Total Quality Management* terhadap Penerapan *Good Governance* yang dilakukan pada Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa implementasi pengendalian intern dan implementasi *total quality management* berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance*. Artinya, jika implementasi pengendalian intern dan *total quality management* semakin baik, maka cenderung penerapan *good governance*-nya baik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENGENDALIAN INTERN DAN *TOTAL QUALITY MANAGEMENT* TERHADAP PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengendalian intern pada PT Dirgantara Indonesia.
2. Bagaimana *total quality management* pada PT Dirgantara Indonesia.
3. Bagaimana penerapan *good corporate governance* pada PT Dirgantara Indonesia.
4. Seberapa besar pengaruh implementasi pengendalian intern dan *total quality management* terhadap penerapan *good corporate governance* pada PT Dirgantara Indonesia baik secara parsial maupun simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pengendalian intern pada PT Dirgantara Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana *total quality management* pada PT Dirgantara Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *good corporate governance* PT Dirgantara Indonesia.

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh implementasi pengendalian intern dan *total quality management* terhadap penerapan *good corporate governance* pada PT Dirgantara Indonesia, baik secara parsial maupun simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris atas pengaruh pengendalian intern dan *total quality management* terhadap *good corporate governance*. Selain itu, dapat juga dipergunakan sebagai bahan pertimbangan antara teori dan praktik yang sebenarnya di dalam perusahaan yang selanjutnya dijadikan referensi penelitian lebih lanjut. Penulis juga mengharapkan kiranya penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pasundan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan penulis khususnya mengenai pengaruh implementasi pengendalian intern dan *total quality management* terhadap penerapan *good corporate governance*, selain itu juga sebagai sarana bagi penulis untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bangku perkuliahan terutama berkaitan dengan judul yang penulis teliti.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pelengkap dan masukan serta pertimbangan yang bermanfaat bagi perusahaan, khususnya mengenai implementasi pengendalian intern, *total quality management* dan penerapan *good corporate governance*.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh implementasi pengendalian intern dan *total quality management* terhadap penerapan *good corporate governance*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di PT Dirgantara Indonesia yang berlokasi di Jl. Pajajaran 154 Bandung. Penelitian dilakukan dari bulan Agustus sampai dengan September 2015.